

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERKAIT PEMBATALAN HASIL LELANG
PENGADAAN PICTURE ARCHIVING COMMUNICATION SYSTEM
(Analisa Putusan Nomor: 59/Pdt G 2017/PN BNA)**

Rahmansyah

Abstrak

Dalam penelitian ini, penulis membahas mengenai aspek hukum terhadap pembatalan hasil pelelangan pengadaan picture archiving communication system yang pada putusan nomor. 59/pdt g 2017/pn bna yang dalam putusan perbuatan melawan hukum, serta untuk mengetahui dan menganalisis tentang proses penyelesaian beserta hasilnya, dalam kasus pembatalan hasil pelelangan pengadaan picture archiving communication system yang secara sah telah melalui prosedur sebagaimana dalam peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2018 perubahan peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan dan dikaitkan juga dengan undang-undang administrasi 30 tahun 2014. namun justru berujung kepada perbuatan melawan hukum. Temuan Studi Menunjukkan Masih Ada Inkonsistensi dalam Penanganan Kasus Litigasi Fakta (*onrechtmatige overheidsdaad*) yang seharusnya dilakukan upaya administrasi hingga pada kewenangan Pengadilan tata usaha negara, namun tetap diperikasa di Pengadilan negeri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dimana yang berasal dari sumber bahan hukum dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Kesimpulan yang didapat dalam pembahasan ini adalah dengan adanya putusan pengadilan negeri yang telah menetapkan pengguna anggaran (pa) dan pejabat pengguna anggaran (ppk) perbuatan melawan hukum dan justru mengakibatkan adanya indikasi yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara, karena adanya kewajiban membayarkan kerugian-kerugian materiil dan inmateriil sebagaimana pada putusan perbuatan melawan.

Kata kunci: Pembatalan, Pengadaan, Perbuatan Melawan Hukum

**UNLAWFUL ACTION RELATED TO CANCELLATION OF PICTURE ARCHIVING
COMMUNICATION SYSTEM PROCUREMENT AUCTION RESULTS
(Decision Analysis Number: 59/Pdt G 2017/PN BNA)**

Rahmansyah

Abstract

In this study, the authors discuss the legal aspects of the cancellation of the auction results for the procurement of a picture archiving communication system in decision number. 59/pdt g 2017/pn bna which in the decision of unlawful acts, as well as to find out and analyze the settlement process and its results, in the case of canceling the auction results for the procurement of a picture archiving communication system which has legally gone through the procedure as stated in government regulation number 16 of 2018 amending presidential regulation number 54 of 2010 concerning procurement and also associated with administrative law 30 of 2014. but instead ended up in unlawful acts. The Study Findings Show that there are still inconsistencies in the handling of fact litigation cases (onrechtmatige overheidsdaad) which should have been carried out by administrative efforts up to the authority of the state administrative court, but are still being examined at the district court. The method used in this study is a normative juridical method which originates from legal sources by examining the laws and regulations related to this research. The conclusion obtained in this discussion is that with the existence of a district court decision that has determined the budget user (PA) and the budget user official (PPK) acts against the law and actually results in indications that can cause losses to state finances, because there is an obligation to pay material and immaterial losses as in the decision to act against.

Keywords: Cancellation, Procurement, Unlawful Acts.